

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

^{1*}Sri Mauliza, ²Fachrun Nissa, ³Mega Hasibuan

¹Universitas Al-Washliyah Medan

^{2,3}Akademi Manajemen Informatika & Komputer Universal

*E-mail korespondensi: srimaliza@univamedan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di pemerintah daerah serta dampaknya terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SAP berbasis akrual merupakan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan menjadi bagian dari reformasi tata kelola keuangan publik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review terhadap 42 artikel ilmiah dan dokumen kebijakan, kemudian diseleksi menjadi 16 artikel relevan yang dipublikasikan pada periode 2020–2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi kebijakan, kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, dan komitmen organisasi. Tiga kendala utama yang ditemukan adalah rendahnya kompetensi aparatur dalam memahami akuntansi akrual, keterbatasan sistem informasi dan infrastruktur teknologi, serta resistensi terhadap perubahan. Meskipun demikian, SAP berbasis akrual terbukti memberikan dampak positif berupa peningkatan kualitas laporan keuangan, opini audit BPK (khususnya opini Wajar Tanpa Pengecualian), serta perencanaan dan pengawasan aset daerah.

Kata kunci : SAP berbasis akrual; akuntansi pemerintahan; kinerja keuangan daerah; opini BPK; transparansi; akuntabilitas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the accrual-based Government Accounting Standards (SAP) in local governments and its impact on regional financial management performance. The adoption of accrual-based SAP is mandated by Government Regulation No. 71 of 2010 and constitutes part of the public financial management reform to enhance transparency, accountability, and the quality of government financial reporting. This research employs a systematic literature review approach on 42 scientific articles and policy documents, which were then screened into 16 relevant articles published between 2020 and 2025. The findings indicate that the implementation of accrual-based SAP is influenced by four key factors: policy communication, human resource competencies, accounting information systems, and organizational commitment. Three main challenges identified include the limited competency of government personnel in understanding accrual accounting, constraints in information systems and technological infrastructure, and resistance to organizational change. Nevertheless, accrual-based SAP has been proven to generate positive impacts, such as improving the quality of financial statements, audit opinions from the Supreme Audit Board (particularly unqualified opinions), as well as enhancing asset planning and monitoring.

Keywords: accrual-based SAP; governmental accounting; regional financial performance; audit opinion; transparency; accountability.

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah, diperlukan suatu sistem akuntansi yang mampu menyajikan informasi keuangan secara lebih komprehensif dan sesuai dengan praktik pelaporan keuangan yang berlaku secara internasional (Putri et al., 2025). Untuk menjawab tuntutan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada seluruh entitas pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

SAP berbasis akrual merupakan pembaruan dari SAP sebelumnya yang masih menggunakan sistem *cash toward accrual* (Aditya et al., 2024). Pada sistem tersebut, pendapatan diakui berdasarkan penerimaan kas, sedangkan belanja diakui ketika terjadi pengeluaran kas. Hal ini menyebabkan informasi keuangan yang disajikan tidak mencerminkan posisi keuangan sesungguhnya karena aset, kewajiban, dan ekuitas dana tidak dilaporkan secara lengkap. Berbeda dengan sistem akrual, SAP berbasis akrual memungkinkan pemerintah untuk mengakui pendapatan, belanja, biaya, aset, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi, meskipun kas belum diterima atau dikeluarkan (Lase et al., 2024). Dengan demikian, kualitas informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih representatif dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

Implementasi SAP berbasis akrual di pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan melalui penyajian laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat diaudit secara obyektif (Husain & Mukrima, 2025). Dengan laporan keuangan yang berkualitas, kepala daerah dapat menyusun kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, legislatif dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif, dan masyarakat dapat mengakses informasi penggunaan dana publik secara terbuka (Hardinto et al., 2025). Selain itu, penerapan SAP berbasis akrual juga menjadi salah satu faktor penilaian dalam pemberian opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Yusriwati & Susanti, 2022). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan sesuai standar dan prinsip akuntansi yang benar (Fazlurahman et al., 2020).

Meskipun telah diatur secara formal, implementasi SAP berbasis akrual bukanlah hal yang mudah. Penerapannya memerlukan kesiapan sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, kebijakan internal, serta komitmen dari seluruh unit kerja di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan temuan Suzitra et al., (2024) menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam penerapan SAP berbasis akrual di pemerintah daerah adalah keterbatasan kompetensi aparatur dalam memahami konsep dan perlakuan akuntansi berbasis akrual. Banyak aparatur yang sebelumnya terbiasa dengan pencatatan berbasis kas, sehingga mengalami kesulitan saat harus bertransisi ke sistem yang lebih kompleks dan detail. Selain itu, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (seperti SIMDA, SIPKD, atau SIPD) tidak selalu berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan,

terutama pada daerah yang memiliki akses teknologi yang kurang memadai.

Hambatan lainnya adalah resistensi perubahan. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual bukan hanya perubahan format pelaporan, tetapi perubahan paradigma kerja. Aparatur yang tidak siap menerima perubahan cenderung menganggap penerapan SAP berbasis akrual sebagai beban administrasi yang memperberat pekerjaan (Kalangi & Tinangon, 2021). Padahal, manfaat jangka panjang yang ditawarkannya sangat besar: peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengawasan, dan evaluasi kinerja keuangan. Dengan kata lain, implementasi SAP berbasis akrual membutuhkan perubahan budaya organisasi, bukan sekadar pelatihan teknis atau penggantian dokumen pelaporan.

Hasil laporan BPK dalam beberapa tahun terakhir masih menunjukkan adanya temuan signifikan terkait implementasi akuntansi berbasis akrual, seperti kesalahan pencatatan aset tetap, ketidaklengkapan dokumen pendukung transaksi, dan ketidaksesuaian antara laporan fisik dan pencatatan administrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa penerapan SAP berbasis akrual belum sepenuhnya berjalan efektif meskipun sudah diterapkan secara nasional.

Dari sisi kebijakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat implementasi SAP berbasis akrual, antara lain melalui penyusunan pedoman teknis, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, serta pengembangan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah masih menjadi pertanyaan yang memerlukan kajian lebih mendalam (Teken & Romarina, 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas implementasi SAP berbasis

akrual dari sudut pandang kuantitatif, misalnya yang menguji pengaruh kompetensi aparatur, teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun, penelitian kualitatif terkait pemahaman mendalam mengenai bagaimana implementasi SAP berbasis akrual dilakukan, apa kendala nyata di lapangan, serta bagaimana proses perubahan organisasi terbentuk masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan kualitatif dapat menggali proses secara lebih komprehensif melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Penelitian kualitatif sangat relevan untuk melihat bagaimana penerapan SAP berbasis akrual mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan daerah secara nyata, bukan sekadar hubungan antar variabel seperti yang banyak dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif mampu menjawab pertanyaan seperti: (1) Apakah aparatur benar-benar memahami prinsip akuntansi berbasis akrual, atau hanya mengikuti prosedur administratif?; (2) Bagaimana proses pengambilan keputusan terkait pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan?; (3) Faktor apa saja yang memperlambat atau mempercepat keberhasilan implementasi?; (4) Bagaimana dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab agar implementasi SAP berbasis akrual tidak sekadar menjadi pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP menjadi

pedoman wajib bagi entitas pelaporan pemerintah pusat maupun daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Prayogo et al., 2023). Di Indonesia, SAP diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, tujuan SAP adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, serta untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode maupun antar entitas pemerintahan. SAP menjadi fondasi utama dalam sistem akuntansi sektor publik di Indonesia dan wajib diterapkan oleh seluruh pemerintah daerah sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan (Saniya et al., 2025).

SAP terdiri dari dua lampiran:

1. Lampiran I – SAP berbasis akrual
2. Lampiran II – SAP berbasis kas menuju akrual (cash toward accrual)

Mulai 2015, seluruh pemerintah daerah diwajibkan menerapkan SAP berbasis akrual sebagai standar utama pelaporan keuangan.

2.2. SAP Berbasis Akrual

SAP berbasis akrual adalah sistem pencatatan akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat terjadi transaksi ekonomi, meskipun kas belum diterima atau dibayarkan. Menurut Lase et al. (2024), sistem ini memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kondisi keuangan pemerintah karena menampilkan seluruh hak dan kewajiban dalam periode pelaporan.

Perbedaan mendasar dengan sistem sebelumnya (cash toward accrual), yaitu:

Tabel 1. Perbedaan Cash Toward Accrual dan Akrual Penuh

Aspek	Cash Toward Accrual (sebelum PP 71/2010)	Akrual Penuh (sesuai PP 71/2010)
Pengakuan pendapatan	Berdasarkan penerimaan kas	Pada saat hak diperoleh
Pengakuan belanja	Saat kas dikeluarkan	Pada saat kewajiban timbul
Pelaporan aset & kewajiban	Tidak lengkap	Disajikan secara menyeluruh
Kualitas informasi	Terbatas	Komprehensif dan representatif

SAP berbasis akrual memungkinkan entitas pemerintah menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Neraca
2. Laporan Operasional (LO)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
4. Laporan Arus Kas (LAK)
5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dengan demikian, penerapan akuntansi berbasis akrual berorientasi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengambilan keputusan fiskal (Husain & Mukrima, 2025).

2.3. Implementasi SAP Berbasis Akrual

Implementasi merupakan penerapan atau pelaksanaan kebijakan dalam konteks organisasi. Menurut Edwards III dalam Widodo (2022), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Dalam konteks SAP berbasis akrual, implementasi mencakup:

1. Komunikasi kebijakan SAP kepada seluruh unit kerja
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten

3. Sistem informasi akuntansi yang memadai
4. Komitmen organisasi dalam perubahan budaya kerja

Suzitra et al. (2024) menyatakan bahwa kompetensi SDM merupakan tantangan terbesar dalam implementasi SAP akrual, karena aparatur yang terbiasa dengan pencatatan berbasis kas membutuhkan waktu untuk memahami mekanisme pengakuan dan pengukuran berbasis akrual. Selain itu, teknologi informasi seperti SIMDA atau SIPD menjadi faktor pendukung penting dalam proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Implementasi SAP juga berkaitan erat dengan *change management* karena penerapannya tidak hanya mengubah format laporan, tetapi juga mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur (Kalangi & Tinangon, 2021).

2.4 Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Kinerja pengelolaan keuangan daerah merujuk pada efektivitas pemerintah dalam mengelola anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan (Medina, 2025). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Efisiensi
4. Efektivitas

Indikator kinerja keuangan daerah umumnya diukur melalui:

1. Kualitas laporan keuangan daerah
2. Tingkat kepatuhan terhadap SAP
3. Opini BPK atas laporan keuangan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan dilakukan sesuai standar akuntansi dan prinsip tata kelola yang baik (Fazlurahman et al., 2020). Dengan demikian,

implementasi SAP berbasis akrual menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pencapaian opini WTP setiap tahun (Yusriwanti & Susanti, 2022).

2.5. Hubungan Implementasi SAP Berbasis Akrual dengan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Secara teoritis, penerapan SAP berbasis akrual berpotensi meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah melalui:

Tabel 2. Penerapan SAP Berbasis Akrual

Mekanisme	Dampak terhadap kinerja keuangan
Pengakuan transaksi secara akrual	Informasi keuangan lebih komprehensif
Penyajian aset-kewajiban secara lengkap	Memperbaiki perencanaan dan pengendalian aset
Penyusunan laporan operasional	Evaluasi efisiensi dan efektivitas program
Mendukung pengawasan internal & eksternal	Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*systematic literature review*) untuk menelaah implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan pengaruhnya terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Studi literatur dipilih karena topik ini telah menjadi fokus kebijakan nasional dan banyak diteliti melalui riset empiris, sehingga diperlukan sintesis ilmiah untuk memetakan temuan yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel pada database Google Scholar, DOAJ, Sinta, dan ResearchGate, dengan kata kunci *SAP berbasis akrual*,

akuntansi pemerintahan, kinerja keuangan daerah, dan opini BPK. Kriteria inklusi meliputi artikel yang dipublikasikan pada rentang tahun 2020–2025, berbasis peer-review, dan secara eksplisit membahas implementasi SAP atau pengaruhnya terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selain artikel ilmiah, dokumen kebijakan seperti Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Permendagri No. 86 Tahun 2017, dan laporan hasil pemeriksaan BPK digunakan sebagai sumber data sekunder.

Setiap literatur diseleksi, dibandingkan, dan disintesis berdasarkan tema penelitian, yaitu faktor pendukung implementasi SAP berbasis akrual, kendala penerapan, dan dampaknya terhadap kinerja keuangan daerah. Sintesis dilakukan secara naratif untuk mengaitkan temuan empiris dengan konsep teoritis yang telah dibahas pada bagian landasan teori. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami proses implementasi SAP tidak hanya dari indikator kuantitatif seperti opini audit, tetapi juga dari aspek perubahan organisasi dan kapasitas sumber daya manusia.

Hasil sintesis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas penerapan SAP berbasis akrual dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya merangkum temuan penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi dalam bentuk pemetaan faktor strategis yang memengaruhi keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual di pemerintah daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran literatur menghasilkan 42 artikel yang relevan dengan topik SAP berbasis akrual. Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi (tahun terbit 2020–2025, artikel membahas implementasi SAP atau kualitas laporan

keuangan daerah), diperoleh 16 artikel utama yang dianalisis lebih lanjut. Literatur yang direview berasal dari jurnal bereputasi nasional dan internasional, serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021–2024.

Hasil review menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh kompetensi SDM, teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara penelitian kualitatif yang menggali proses implementasi dan dinamika perubahan organisasi masih relatif terbatas.

4.1. Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

Berdasarkan sintesis literatur, implementasi SAP berbasis akrual menunjukkan pola umum sebagai berikut:

Tabel 3. Implementasi SAP

Aspek Implementasi SAP	Temuan Penelitian
Komunikasi kebijakan	Kebijakan SAP telah tersosialisasi, namun penyebarannya tidak merata dan sering hanya bersifat administratif (Prayogo et al., 2023).
Sumber daya manusia	Kompetensi SDM masih menjadi hambatan terbesar, terutama pada pengakuan dan penyajian aset, serta pencatatan transaksi non-kas (Khansa et al., 2025).
Sistem informasi akuntansi	SIMDA/SIPD membantu pencatatan, tetapi keterbatasan jaringan dan ketergantungan terhadap operator teknis masih tinggi (Ardianti et al., 2023).
Komitmen organisasi	Tingkat komitmen berbeda antar perangkat daerah; masih ditemukan resistensi karena perubahan menambah beban administrasi (Hendriyani et al., 2022).

4.2. Kendala Utama Implementasi SAP Berbasis Akrua

Dari hasil review artikel, ditemukan tiga kelompok kendala utama:

1. Kompetensi SDM rendah
Aparatur masih kesulitan memahami pengakuan pendapatan, belanja, dan aset secara akrual. Suzitra et al. (2024) menyebutkan aparatur masih terbiasa dengan pencatatan berbasis kas.
2. Sistem informasi dan infrastruktur belum optimal
Beberapa perangkat daerah sering mengalami kesalahan input pada aplikasi SIMDA/SIPD, terutama untuk transaksi aset. Hasil LHP BPK menunjukkan kesalahan pencatatan aset tetap menjadi temuan berulang.
3. Resistensi terhadap perubahan (change resistance)
Aparatur menganggap SAP berbasis akrual meningkatkan beban kerja administrasi. Kalangi & Tinangon (2021) menegaskan bahwa resistensi lebih banyak disebabkan kurangnya pemahaman manfaat jangka panjang.

Kendala tersebut membuktikan bahwa implementasi SAP bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga perubahan budaya kerja organisasi.

4.3. Dampak Implementasi SAP terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

Temuan literatur menunjukkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan.

1. Meningkatkan kualitas informasi keuangan
Laporan keuangan menjadi lebih

lengkap karena aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat secara keseluruhan. Lase et al. (2024) menyebutkan SAP akrual meningkatkan kualitas laporan dibanding sistem sebelumnya.

2. Meningkatkan opini BPK
Pemerintah daerah yang konsisten menerapkan SAP berbasis akrual cenderung memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yusriwati & Susanti (2022) menemukan bahwa daerah yang memiliki komitmen implementasi SAP lebih tinggi memperoleh opini audit yang lebih baik.
3. Meningkatkan perencanaan dan pengawasan aset
Data aset yang lengkap mendukung proses inventarisasi dan pengendalian internal.

Secara keseluruhan, SAP akrual berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas SDM dan dukungan sistem teknologi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penulis, dapat disimpulkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. SAP akrual terbukti mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penyajian informasi yang lebih komprehensif, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi sektor publik. Sejalan dengan itu, daerah yang konsisten menerapkan SAP akrual cenderung memperoleh opini audit yang lebih baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagai indikator peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan.

Namun, efektivitas implementasi SAP akrual sangat ditentukan oleh kesiapan

internal pemerintah daerah. Terdapat tiga kendala utama yang menghambat pelaksanaannya, yaitu: (1) rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam memahami pengakuan dan pencatatan transaksi berbasis akrual, karena sebagian aparatur masih terbiasa dengan sistem berbasis kas; (2) keterbatasan sistem informasi dan infrastruktur teknologi yang menyebabkan kesalahan pencatatan dan ketergantungan pada operator teknis; serta (3) resistensi terhadap perubahan karena penerapan SAP akrual dianggap menambah beban administrasi dan belum sepenuhnya dipahami manfaat jangka panjangnya. Kendala tersebut menunjukkan bahwa penerapan SAP akrual bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga menuntut perubahan budaya organisasi.

Dengan demikian, implementasi SAP berbasis akrual memiliki potensi besar dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, tetapi keberhasilan penerapannya membutuhkan penguatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem informasi keuangan daerah, dan komitmen organisasi untuk mendukung perubahan. Upaya tersebut penting agar penerapan SAP akrual tidak hanya sebatas pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkinerja baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., Djasuli, M., Priambadha, M. A., Abimanyu, A., & Ardiansyah, R. (2024). Pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 174–194.
- Ardianti, S., Harmain, H., & Inayah, N. (2023). Analisis Penerapan Teknologi Informasi Pada Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pelayanan Rawat Inap (Studi Kasus di RSUD Aek Kanopan Kabupaten Labuhanbatu Utara). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 3(2), 403–415. <https://doi.org/10.36987/jumsi.v3i2.4047>
- Fazlurahman, F., Fatriananda, C., & Jauhari, R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bandung Sebelum dan Setelah Mendapatkan Opini WTP dari BPK. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 11(1), 56–62. <https://doi.org/10.36982/jiegm.k.v11i1.1062>
- Hardinto, A. A., Kusumaningrum, F., & Kesuma, A. (2025). Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan Dan Transparansi Informasi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Kalbisocio, Jurnal Bisnis & Komunikasi*, 12(3).
- Hendriyani, W., Budiono, P., & Kurniawan, R. C. (2022). RESISTENSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PADA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PLANING DAN E-BUDGETING DI PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU. *Wacana Publik*, 16(01).
- Husain, F., & Mukrima, H. (2025). IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI KABUPATEN GORONTALO. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 24(1), 63–69.

- <https://doi.org/10.29303/aksioma.v24i1.454>
- Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2021). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL,"* 12(1).
- Khansa, R. S., Savilka, N., & Fadhillah, R. A. (2025). Penerapan SAK ETAP dan Faktor Pendukungnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM di Era Digital. *Journal ANC, 01(05)*.
- Lase, J. A. P., Simbolon, J. A., Siregar, R. M. M., & Efendi, D. (2024). Evaluasi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis, 2(1)*, 16–23.
- Medina, L. (2025). Peran E-Wallet sebagai Platform Pembayaran Pajak dan Pendukung Kepatuhan Pajak. *IKRAITH-EKONOMIKA, 8(2)*, 1011–1019. <https://doi.org/10.37817/IKRAITH-EKONOMIKA>
- Prayogo, Y., Fikri, A. S., & Nandini, K. P. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaL dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. *JURNAL MANAJEMEN SOSIAL EKONOMI (DINAMIKA), 3(2)*, 44–58.
- Putri, B. I., Astuti, A., & Afianta, A. Y. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas: Peran Good Governance dalam Akuntansi Sektor Publik. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE), 5(2)*, 106–115.
- Saniya, T., Yulianasari, N., & Herawati, H. (2025). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business, 8(3)*.
- Suzitra, R., Hamzani, U., & Fahmi, M. (2024). PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL TERHADAP BARANG MILIK NEGARA. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), 8(3)*, 1168–1185. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4568>
- Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2024). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Denpasar. *JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU, 4(2)*, 111–123. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i2.4419>
- Yusriwanti, Y., & Susanti, N. (2022). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

DAERAH (STUDI KASUS
PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KAB.
INHIL). *JURNAL AKUNTANSI
DAN KEUANGAN*, 11(1), 34–44.
<https://doi.org/10.32520/jak.v11i1.2018>

